

PELANGGAR PROKES MAYORITAS DIKENAI TEGURAN

Kedepankan Edukasi, Sanksi Pidana Belum Jadi Prioritas

YOGYA (KR) - Hingga saat ini Pemkot Yogya masih mengedepankan edukasi dibanding penerapan sanksi berupa pidana bagi pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Pendekatan humanis dinilai lebih mudah menanamkan kesadaran untuk mencegah penularan Covid-19.

"Sampai sekarang yang kami lakukan masih fokus pada edukasi agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan. Jika ada pelanggaran, ya kami lakukan teguran," jelas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogya Agus Winarto, Senin (21/3).

Bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang masih kerap ditemui, di antaranya tidak mengenakan masker atau tidak memakai masker dengan benar. Menurut Agus, petugas Satpol PP Kota Yogya yang melakukan patroli selalu dibekali

dengan masker yang akan diberikan kepada masyarakat atau wisatawan yang kedatangan tidak mengenakan masker. "Dengan melakukan edukasi dan imbauan yang terus menerus, maka diharapkan akan terbangun kesadaran masyarakat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan," imbuhnya.

Selain itu, Agus meminta pelaku usaha untuk segera melengkapi tempat usahanya dengan QR Code PeduliLindungi. Hal ini karena masih banyak minimarket waralaba yang belum memilikinya dengan

alasan karena seluruh perizinannya dilakukan dari pusat.

Hal senada disampaikan Walikota Yogya Haryadi Suyuti. Pihaknya mengaku akan terus membangun kesadaran masyarakat untuk selalu disiplin memakai masker. "Pemberian sanksi memang ditujukan untuk membangun kesadaran. Tetapi sanksi yang paling berat yang harus disadari masyarakat saat tidak menerapkan protokol kesehatan adalah potensi tertular dan menularkan penyakit. Itu yang harus dipahami," tandasnya.

Salah satu protokol kesehatan dasar yang harus dilakukan pada masa pandemi adalah disiplin mengenakan masker. "Masker ini sudah menjadi identitas. Cukup mudah untuk mengingatkan masyarakat karena terlihat jelas apabila

mereka tidak mengenakan masker," katanya.

Oleh karena itu, penegakan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat seharusnya tidak perlu lagi disertai dengan ancaman sanksi yang mengarah pidana tetapi diarahkan pada upaya membangun kesadaran masyarakat.

Saat ini Pemda DIY memiliki Perda 2/2022 tentang Penanggulangan Covid-19 yang di dalamnya mengatur sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan. Sanksi diatur dalam dua tahap. Sanksi pertama yang bisa diberikan adalah teguran lisan, denda administratif, atau kerja sosial. Jika pelanggaran sudah melanggar untuk kedua kali maka akan langsung diproses pidana. Sanksi tersebut berlaku untuk penduduk DIY maupun luar DIY. **(Dhi)-f**

Bulan Ruwah, Warga Mangkukusuman 'Reresik' Makam

SUASANA guyub rukun terasa saat Reresik (bersih-bersih) makam, Minggu (20/3) pagi di Makam Mangkukusuman, Bacio, Yogya. Kegiatan dirangkai Apeman Mangkukusuman di Bulan Sya'ban/Ruwah dengan tema 'Memetri Para Luhur'. Perwakilan warga Kampung Mangkukusuman dari RW 1-3, dan RT 1-9 terlibat aktif bergotong royong.

"Warga melalui perangkat RT/RW diminta membuat apem sebagai sajian nyadran di makam dan warga sekitar," ucap Ketua Pemuda Kangmaman (Kanoman Mangkukusuman Manunggal) Ris Winarso kepada KR di sela kegiatan.

Ris menyebutkan semula tiap RW ditarget hanya mengirim 5-6 warga atau sekitar 20 orang ternyata antusiasme warga sangat tinggi. "Kegiatan kolaborasi ini juga menjadi ajang silaturahmi warga dengan prokes," ujarnya.

Kegiatan yang diprakarsai pemuda ini mendapat apresiasi Ketua RK Bambang Muhari, Ketua Jagawarga Heru Waluyo dan juga Lurah Bacio Handra Sutrisna yang hadir dan ikut aktif *reretik* bersama warga lainnya. "Tahun lalu, yang juara apeman, pada penyelenggaraan tahun ini juga siap memeriahkan even pariwisata dalam Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman," terang Bambang.

Ketua RW 02 Andy Setyanta menyebutkan kegiatan ini sebagai wujud memetri jejak para luhur dan penguatan identitas sebagai warga Kampung Mangkukusuman. **(Vin)-f**



KR-Juvintarto

Warga Mangkukusuman menyediakan apem dan menu tradisional sebagai sajian dalam kegiatan Reresik Makam.

TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Sudahi Perdebatan Logo, Cermati Prosesnya



KR-Istimewa

Gus Hilmy dalam seminar produk halal.

YOGYA (KR) - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr H Hilmy Muhammad MA berharap masyarakat tidak lagi memperdebatkan logo halal yang diluncurkan Kementerian Agama (Kemenag) belum lama ini.

"Logo sudah ditetapkan pemerintah, sudah tidak perlu lagi diperdebatkan. Tentang logo itu tidaklah substansial. Justru yang lebih penting cermati proses sertifikasi halal itu berlangsung dengan baik, dari sejak hulu sampai hilir," ujar Katib Syuriah PBNU tersebut saat menyelenggarakan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Komplek Q PP Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, Minggu (20/3).

Kegiatan tersebut mengambil tema 'Jaminan Produk Halal Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Hubungan Antarumat Beragama'.

Lebih lanjut, pria yang juga akrab disapa Gus

Hilmy tersebut mengharapkan masyarakat tidak terpancing jika ada orang yang mencemooh logo halal. Ia menganalogikan bahwa orang yang hanya membicarakan soal bentuk dan person, berarti orang kecil. Sementara orang besar selalu bicara tentang ide.

"Sudah urusan logo. Mari kita cermati proses halalnya. Kita ajak UMKM yang belum mendapatkan label halal, jika perlu didampingi dan didaftarkan," ajak salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak tersebut.

Terkait kehalalan produk, Gus Hilmy juga menyinggung tidak hanya terkait makanan, tetapi juga banyak hal termasuk bahan olahan makanan, obat dan kosmetika. Di luar hal itu, Gus Hilmy juga menekankan kejujuran, baik terkait proses mendapatkan sertifikatnya maupun dalam pengajuan kehalalan produk dengan tidak menyembunyikan bahan-bahan produknya. **(Feb)-f**

NEGARA BISA MELAKUKAN TINDAKAN Banyak Aliran Sesat Berdalih Kebebasan Beragama

YOGYA (KR) - Selain agama resmi, saat ini di Indonesia berkembang aliran-aliran agama sesat/menyimpang yang sering meresahkan kehidupan beragama dan masyarakat. Para penganut aliran sesat tersebut sering mengatasnamakan kebebasan beragama.

Selain itu juga bermunculan pernyataan-pernyataan yang sering mengusik kerukunan umat bergama. Pernyataan tersebut banyak dikeluarkan oleh para penggerak kebebasan beragama dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Demikian disampaikan Anggota DPD RI Cholid Mahmud dalam forum Sosialisasi MPR RI di Yogyakarta, Minggu (20/3) dengan peserta para pengurus dan anggota PW Ikatan Dai (Ikadi) DIY.

Menurut Cholid, pada prinsipnya negara tidak bisa campur tangan sepanjang menyangkut kepercayaan, pemikiran atau pemahaman orang perorangan menyangkut

suatu keyakinan agama. Tetapi apabila hal itu sampai menimbulkan keresahan di masyarakat serta mengganggu ketenteraman kehidupan beragama, maka negara demi untuk melindungi kepentingan publik bisa bertindak menurut hukum yang berlaku. "Kepentingan individu dan sekelompok orang di mana pun tidak bisa mengalahkan kemashlahatan masyarakat dan umat yang lebih luas," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, kata Cholid, perlu ada upaya penggalian kembali norma-norma falsafah Pancasila (Sila Ketuhanan yang Maha Esa) dan pasal 29, UUD 1945 agar menjadi spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral serta menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia.

"Upaya ini juga untuk memastikan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 senantiasa bersemayam dalam hukum Indonesia," pungkasnya. **(Dev)-f**

'UNIVFAIR' HOMESCHOOLING HSPG Dampingi Siswa Merencanakan Masa Depan yang Baik



KR-Istimewa

Peserta didik Homeschooling HSPG mengikuti UnivFair secara daring.

YOGYA (KR) - Homeschooling HSPG Pusat (Yogyakarta) menyelenggarakan kegiatan bertajuk 'UnivFair' untuk mendampingi, membekali sekaligus memotivasi para siswanya (terutama kelas 12) dalam merencanakan masa depan yang baik. UnivFair terbagi 3 bagian dimulai sejak Januari-Maret 2022.

Ketua panitia UnivFair Homeschooling HSPG, Veronika Erlina Harimastuti SPd menuturkan, UnivFair #1 Empowerment diselenggarakan 28 Januari dan 4 Februari 2022, bertujuan melakukan pemetaan rencana masa depan siswa setelah lulus sekolah. Selaku narasumber General Manager Homechooling HSPG Anggo

Marantika MSc. "Peserta UnivFair adalah siswa kelas 12, tapi ada juga dari kelas 10 dan 11, baik siswa HSPG Pusat (Yogyakarta) ataupun siswa HSPG Cabang di seluruh Indonesia melalui daring," terang Vero kepada KR, Minggu (20/3).

Setelah itu UnivFair #2 Sosialisasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Entrepreneurship pada 25 Februari 2022 diikuti peserta didik HSPG se-Indonesia secara daring via zoom. Room zoom dibagi 2 yaitu main room untuk siswa yang ingin melanjutkan kuliah dan breakout room untuk siswa yang setelah lulus ingin bekerja, membuka usaha dan lainnya. PTS yang dihadirkan yaitu City

College Plymouth, Universitas Sanata Dharma, Universitas Islam Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Universitas Pertamina.

UnivFair #3 Sosialisasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Sharing Alumni HSPG pada 18 Maret 2022 yang juga digelar daring diikuti siswa HSPG se-Indonesia. Sharing alumni menghadirkan 2 alumnus yang berkecimpung di dunia entrepreneur yaitu Yoane Larasati (owner coffeshop) dan Jibrin Mahamboro (kontraktor). PTN yang dihadirkan yaitu UGM, UNY dan UPN Veteran.

"Jadi untuk sesi sosialisasi PTS dan PTN itu dijelaskan oleh para narasumber resmi dari pihak universitas tersebut informasi mengenai jalur pendaftaran, fakultas, prodi dan jurusan yang ada serta syarat-syarat mendaftarnya. Sedangkan di sesi sharing alumni dibagikan tips dan trik berwirausaha," katanya.

Direktur Homeschooling HSPG, Ir Kusnanto MM menuturkan, UnivFair rutin digelar setiap tahun, untuk menyiapkan siswa dalam menentukan pilihan setelah lulus sekolah. **(Dev)-f**

Wujudkan Rumah Aman bagi Korban Kekerasan

YOGYA (KR) - Pola penanganan korban kekerasan di Kota Yogya dinilai sudah semakin baik. Terutama sistem yang ada di pemerintahan serta keterlibatan unsur masyarakat. Hanya, keberadaan rumah aman untuk melindungi korban kekerasan selama proses penanganan masih belum tersedia secara representatif.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Suryani SE MSi, berharap keberadaan rumah aman tersebut harus segera diwujudkan. "Kami di lembaga dewan siap memberikan dukungan. Rumah aman menjadi pelindung bagi korban kekerasan sehingga betul-betul merasa aman," tandasnya.

Saat ini terdapat Unit Pelaksana Tugas (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang fokus menangani korban kekerasan. Basis tugasannya pun berbasis gender sehingga tidak hanya perempuan dan anak melainkan siapa pun yang menjadi korban kekerasan dapat diberikan pendampingan.

Suryani menambahkan, dari aspek sistem sebenarnya terdapat beberapa lembaga yang terlibat. Antara lain Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), kader siap gerak atasi kekerasan

Suryani SE MSi Fraksi PDI Perjuangan



KR-Istimewa

(Sigrak), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan lain sebagainya. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut, hampir semua kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat dapat dilaporkan. "Angka kasusnya terlihat banyak namun itu karena masyarakat ikut melapor. Sehingga rumah aman perlu diwujudkan," tandasnya.

Sebelumnya, korban kekerasan di Kota Yogya sempat dititipkan di fasilitas yang dimiliki DIY. Selain itu ada alokasi anggaran untuk dinikmati di hotel. Akan tetapi akan lebih efektif jika memiliki rumah aman yang didalamnya terdapat ruang konselor hingga pengacara.

Lokasi rumah aman pun tidak boleh diketahui oleh publik guna menjaga psikis korban. "Bisa jadi dari fisik sudah sembuh namun psikisnya kan masih membekas. Jadi perlu didampingi secara intensif dan harapannya rumah aman nantinya menjadi tempat yang optimal bagi penanganan kekerasan sampai tuntas," urai Suryani.

Dari aspek lahan, Pemkot sebenarnya memiliki lahan yang saat ini dikelola salah satu dinas. Di sana sudah terdapat petugas keamanan sehingga dapat dikaji untuk teknis pembangunannya. **(Dhi)-f**